

**SKRIPSI**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KREATIF MENENUN KAIN SONGKET  
KHAS SASAK DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA  
(STUDI DI DESA SUKARARAKECAMATAN JONGGAT LOMBOK  
TENGAH)**

*(Creative community empowerment to weave sasak typical songket cloth in  
improving the village economy ( study In The Village sukarara In The sub-District  
Jonggat Lombok Tengah)*



**JURUSAN URUSAN PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2019**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KREATIF MENENUN KAIN SONGKET  
KHAS SASAK DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA  
(STUDI DI DESA SUKARARAKECAMATAN JONGGAT LOMBOK  
TENGAH)**

*(Creative community empowerment to weave sasak typical songket cloth in  
improving the village economy ( study In The Village sukarara In The sub-District  
Jonggat Lombok Tengah)*



**JURUSAN URUSAN PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2019**

**HALAMAN PERASETUJUAN**

**Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia skripsi pada :**

**Hari : Jum'at**

**Tanggal : 09 Agustus 2019**

**Menyetujui:**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

  
**(Drs. Mintasrihadi, M.H)**  
**NIDN. 08330016101**

  
**(Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP)**  
**NIDN.081607902**

**Mengetahui:**

**Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Ketua Program Studi**

  
**(Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.)**  
**NIDN. 0822098901**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KREARTIF MENENUN KAIN SONGKET KHAS**  
**SASAK DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA (STUDI DI DESA**  
**SUKARARA KECAMATAN JONGGAT LOMBOK TENGAH)**

Oleh :

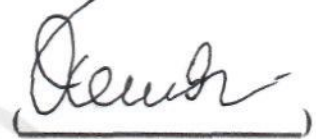
**SONIA GANDI**  
**NIM. 21511A0021**

Pada tanggal, 09 Agustus 2019

Telah dipersetujukan dengan baik di depan dosen penguji :

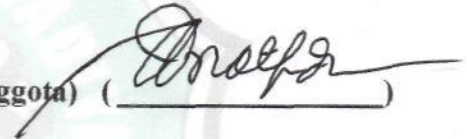
1. **Mintasrihadi, M.H**  
NIDN. 0804117201

(Ketua)



2. **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
NIDN.081607902

(Anggota)



3. **Rishan Adha, SE., ME**  
NIDN. 0813078902

(Anggota)



Mengetahui,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



  
**Drs. Amil., M.M**  
NIDN. 0831126204

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sonia Gandi

Nim : 21511A0021

Judul Skripsi : “Pemberdayaan Masyarakat Kreatif Menenun Kain Songket Khas Sasak Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari skripsi. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dilemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini dan sanksi lain dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 09 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

METERAI  
TEMPEL

CF043AFF902290506

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**SONIA GANDI**

**NIM. 21511A0021**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila a telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap ”.*  
(Q.S. Al-Insyirah: 7-9)

Sujud Syukurku persembahkan padaMu Ya Allah atas takdir yang kau jadikan aku sebagai manusia yang senantiasa selalu berfikir, berilmu, beriman dan bersabar menjalani kehidupan ini waktu yang sudah ku jalani dengan jalan hidup yang menjadi takdirku, sedih, bahagia bertemu dengan orang-orang yang memberikan sejuta pengalaman dan warna warni kehidupan di dunia. Karya tulis ini kupersembahkan kepada :

1. Terimakasih untu Suamiku tercinta yang sudah berjuang dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir semester ini.
2. Ibunda tersayang Minase dan Ayahku H. Salehudin S.Ag. Mereka berdua yang telah memberiku dorongan dan motivasi tanpa ada akhir, kasih sayang yang tak terhingga. Ayah, Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado yang terindah sebagai tanda bukti keseriusanku dalam hidupku.
3. Terima kasih untuk keluargaku tercinta Nenek, kakek, bibik, paman yang telah memberikan dukungan serta semangat kepadaku.
4. Terima kasih untuk sahabat istimewa atas doa,dukungan, semangat serta bantuan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini.
5. Untuk teman-temanku yang selalu membantu dan mendukungku :ulya sumarni k, L. Didik Suhartadi, Siti Halimah, Ardix boy, heru prayoga, Almaruf, dan teman-temanku yang lain.
6. Almamaterku.

**MOTTO**

***KEMUDAHAN TIDAK BISA DI CAPAI TANPA KESUNGGUHAN.***

***ORANG YANG MAUNYA HANYA GAMPANG-GAMPANG, HIDUPNYA JUSTRU SULIT.***

***ORANG YANG HIDUPNYA BAIK- ADALAH ORANG YANG SELALU RAJIN, YANG  
TEKUN, YANG MENERUSKAN WALAUPUN SEMPAT GAGAL, YANG TETAP  
MENEGAKAN DIRI SAAT BERSEDIH, DAN MERAMAHKAN DIRI SAAT SEBETULNYA  
KECEWA DAN MARAH.***

***YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH YANG DAPAT***

*BY Sonia gandi*



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KREATIF MENENUN KAIN SONGKET  
KHAS SASAK DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA  
(STUDI DI DESA SUKARARA KECAMATAN JONGGAT LOMBOK  
TENGAH)**

**Sonia Gandi<sup>1</sup>, Mintasrihadi, M.H<sup>2</sup>, M. Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP<sup>3</sup>**

1. Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Fisipol UMMAT
2. Dosen Prodi Administrasi Pemerintahan UMMAT
3. Dosen Prodi Administrasi Publik UMMAT

**ABSTRAK**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan cara mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data hasil penelitian ini menemukan bahwa Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kreatif menenun adalah:

- a. Strategi Pengembangan SDM
- b. Program Pengembangan kelembagaan yang di maksud adalah pengembangan atau pemberdayaan masyarakat kreatif ini di bantu juga oleh lembaga-lebaga local seperti Lembaga Adat dan Pelatih menenun.
- c. Program Pemupukan Modal, yang di mana di maksud adalah untuk memodalkan masyarakat untuk melakukan menenun kain songket.

Promosi yang dilakukan Lembaga Adat dan Puast Kegiatan Belajar Kegiatan Masyarakat di Desa Sukarara sudah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, karena semakin kreatifnya masyarakat semakin meningkat juga penjualan, artinya semakin meningkat perekonomian Desa Sukarara.

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan Masyarakat Kreatif Menenun Kain Songket Khas Sasak



**EMPOWERMENT CREATIVE SOCIETY WEAVE FABRIC KHAS SASAK IN  
IMPROVING ECONOMY THE VILLAGE  
(STUDIEST IN SUKARARA VILLAGE KECAMATAN JONGGAT LOMBOK  
TENGAH)**

**Sonia Gandi<sup>1</sup>, Mintasrihadi, M.H<sup>2</sup>, M. Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP<sup>3</sup>**

1. *Student of public Administration Study Program at UMMAT Faculty of Social Sciences*
2. *Lecturer in government Adminisration Study Program at UMMAT Faculty of Social government*
3. *Lecturer in public Adminstration Study Program at UMMAT Faculty of Social Sciences*

**ABSTRACT**

*In this research the author uses Descriptive Research type with a Qualitative aooroach, by processing and analyzing data using qualitative analysis.*

*Based on interviews and data analysis the results of this study found that the creative weaving community empowerment strategy was :*

1. *Strategy human resource deve;opment strategy*
2. *Program development sinstitutional local what is meant is the development or empowerment of this creative community also assistend by local institution such as traditional institutions and training weaving.*
3. *Program capital fertilization which where the intention is to capitalize on society to do weaving cloth Sasak*

*Promotion carried out by the traditional institution of Sukarara Village had a good impact on society, because the more creative the community is yhe seller also increases, meaning that the village economy of sukarara is increasing,*

*Keywords : Strategy empowering creative communities to weave songket typical of sasak to improve the economy of Sukarara Village.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “**pemberdayaan Masyarakat Kreatif Menenun Kain Songket Khas Sasak Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa**” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi SI pada jurusan Urusan Publik Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta Salam serta senantiasa saya haturkan kepada junjungan baginda Muhammad SAW seorang manusia teladan yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah Islam keseluruh umat manusia sebagai agama yang lurus.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dukungan baik secara moril maupun material sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Drs. H. M. Junaidin MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Rahmad Hidayat S.Ap, M.Ap selaku Ketua Prodi Administrasi Publik
4. Mintasrihadi, M.H, selaku Pembimbing Utama
5. Ayatullah Hadi S.IP., M.IP, selaku Dosen Pembimbing Pendamping
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah ikhlas dalam memberikan ilmu selama perkuliahan hingga selesai, dan seluruh pegawai staff tata usaha pengelola perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
7. Bapak dan ibu serta keluargaku yang telah memberikan dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini

8. Terima kasih kepada semua pihak dari kantor dinas pariwisata kabupaten bima dan penjaga uma lengge kecamatan wawo yang telah banyak membantu memudahkan peneliti dalam penelitian.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh, karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan Skripsi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Lembar Pernyataan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Motto</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vii</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>viii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Daftar Bagan</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LatarBelakang .....	1
1.2 RumusanMasalah .....	4
1.3 TujuanPenelitian .....	5
1.4 ManfaatPenelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 PenelitianTerdahulu .....	7
2.2 Tinjauan Pustaka .....	9
A. Konsep Kepemimpinan .....	9
B. Tugas & fungsi Kepala Desa menurut UU no6 thn 2014 .....	10
C. Faktor yang mempengaruhi dalam Pemberdayaan .....	15
D. <i>Konsep Pemberdayaan Masyarakat</i> .....	17
E. Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	19
F. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Masyarakat .....	21

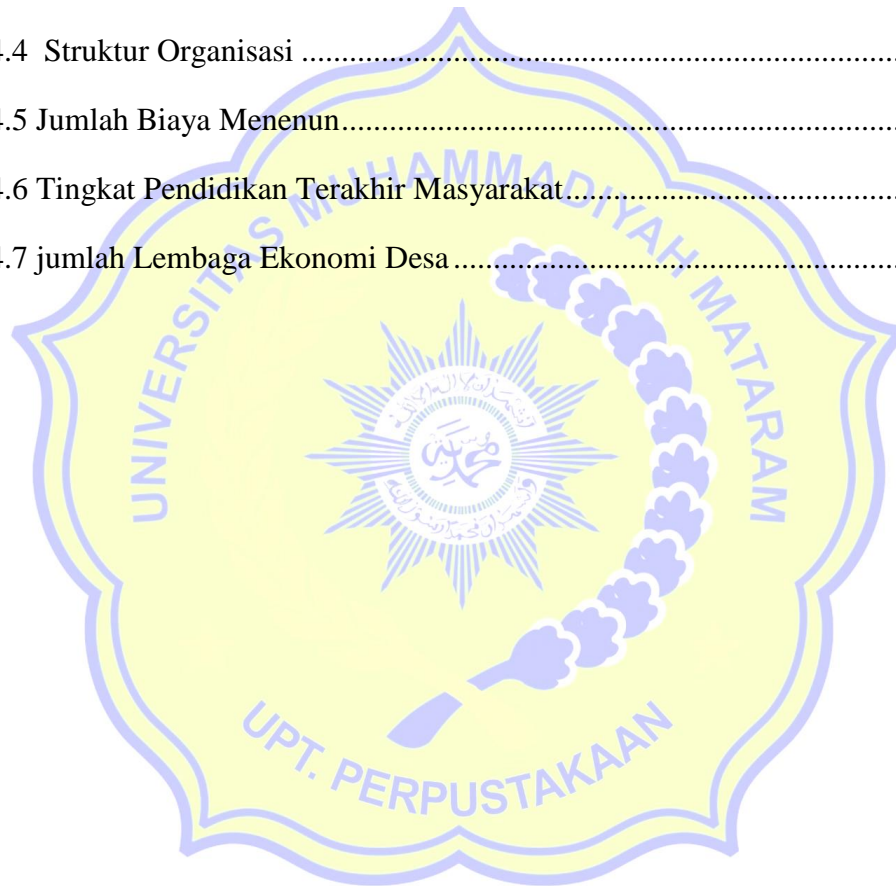
2.3 Kerangka Berfikir.....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
3.3 Narasumber .....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Teknik pengumpulan data.....	33
3.5.1 Observasi.....	33
3.5.2. Wawancara.....	33
3.5.3. Dokumentasi .....	33
3.5.4. Teknik Analisis Data.....	34
3.5.5. Reduksi Data.....	34
3.5.6. Penyajian Data .....	34
3.5.7. Verifikasi.....	34
3.5.8. Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
4.1 Profil Desa Sukarara .....	36
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Sukarara .....	36
4.1.2 Visi dan Misi Desa Sukarara.....	37
4.1.3 Letak Geografis.....	38
4.1.4 Gambaran Umum Demografi.....	39
4.1.5 Struktur Organisasi .....	42
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	37
1. Strategi Pengembangan SDM .....	44
2. Program Pengembangan Kelembagaan Lokal .....	44
3. Program Pemupukan Modal.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
5.1 Simpulan .....	63
5.2 Saran.....	64

## Daftar Pustaka

## Lampiran

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
Tabel 4.1 Luas Dusun Rt, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk .....	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut Agama .....	41
Tabel 4.3 Jumlah Pendidikan Terakhir .....	77
Tabel 4.4 Struktur Organisasi .....	43
Tabel 4.5 Jumlah Biaya Menenun.....	46
Table 4.6 Tingkat Pendidikan Terakhir Masyarakat.....	48
Table 4.7 jumlah Lembaga Ekonomi Desa.....	56



## DAFTAR BAGAN

	<b>Halaman</b>
Bagan 2.1 Kerangka Berfikir .....	29
Bagan 4,1 Struktur Organisasi Desa Sukarara .....	43



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, membuat kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Otonomi asli merupakan bentuk kewenangan yang hanya dimiliki oleh Desa berdasarkan adat-istiadat yang hidup dan dihormati di suatu Desa yang bersangkutan. Senada dengan kewenangan Desa pasal 18 yakni kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Hal tersebut kurang mendapat perhatian kita, sehingga dapat menyebabkan kegiatan administrasi dalam organisasi pemerintahan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal semacam ini kemungkinan dapat membawa dampak negatif bagi suatu pemerintahan, maksudnya penyelenggaraan ataupun pengembangan organisasi pemerintahan Desa tidak berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu Pemerintah Desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa.



Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberdayakan masyarakat melalui potensi Kreatif Menenun Kain Songket, di mana Kepala Desa selaku pemimpin adalah mengarahkan atau memberikan motivasi terhadap Masyarakat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena keberhasilan suatu organisasi baik itu organisasi besar atau kecil tergantung dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu peran serta masyarakat terhadap pengembangan organisasi pemerintah sangat diharapkan terutama para pemuda sebagai penggerak atas berhasilnya segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kain songket tenun baik itu dalam pembuatan ataupun pemasarannya . Dalam hal ini tidak lepas tanggung jawab seorang Kepala Desa selaku pembina masyarakat demi terselenggaranya otonomi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka strategi dan program kebijakan pemerintahan selaku pemimpin harus memiliki relevansi yang dapat memudahkan masyarakat ikut berpartisipasi sekaligus turut pula menikmati hasil-hasil kerja mereka dengan baik. Ini berarti pula bahwa setiap peraturan yang ada dalam organisasi tersebut sangat perlu dituangkan dalam aturan dan kebijakan yang lebih mudah dan biaya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa. Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Dengan kata lain membangun daya itu dengan mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awarenes) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Ketiga, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah tambah lemah, karena kurang berdaya menghadapi yang kuat.

Kepala Desa sebagai aparatur pemerintah memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, sebab disamping sebagai abdi negara dalam rangka menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan, juga sebagai abdi masyarakat dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Siagian (1994:55), mengemukakan bahwa pemimpin diperlukan untuk menentukan tujuan, mengolah sumber daya yang langka, memfokuskan pada tujuan organisasi, dan pengawasan berbagai fungsi yang berbeda-beda. Pemimpin sebagai pengambil keputusan dalam organisasi kerja dan setiap keputusan pemimpin akan dilaksanakan oleh para stafnya sesuai dengan tugas dan fungsi dari organisasi yang dipimpinnya dalam rangka pencapaian tujuan. Pengambilan keputusan yang dilakukan setiap pemimpin, diharapkan dapat mengandung unsur-unsur good governance yang mencakup akuntabel dan transparansi dengan melibatkan staf sebagai mitra yang sekaligus sebagai pelaksana keputusan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah merupakan salah satu alternatif mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Desa Sukarara, seperti usaha dalam meningkatkan penjualan Kain songket masyarakat. Ditambah pengadaan

pertokoan (Arthsop) khusus untuk penjualan Kain Songket dari seluruh masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa Sukarara untuk meningkatkan kepuasan, kenyamanan dalam pelayanan terhadap masyarakatnya. Sehingga baik dalam visi, misi dan tujuan Desa Sukarara harus mengkondisikan perlu adanya suatu upaya dalam pemberdayaan masyarakat.

Desa Sukarara merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jonggat Lombok Tengah yang mempunyai jumlah rumah tangga yang mayoritas kurang mampu yakni 131 KK miskin serta sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut diharapkan dengan dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat angka rumah tangga miskin dapat berkurang. Kepala Desa selaku pemimpin di wilayah tersebut diharapkan lebih efektif melaksanakan kepemimpinannya, serta mengajak kerja sama yang baik dengan pengurus, tokoh Adat, ketua BPD agar kendala yang ditemui di lapangan dapat dicarikan solusinya.

Dari masalah yang telah diuraikan tadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Lombok Tengah)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Pemberdayaan Masyarakat Kreatif menenun kain Songket Khas Sasak dalam Meningkatkan Perekonomian Desa di Desa Sukarara Kecamatan Joggat?

### **1.3. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Kreatif Menenun Kain Songket Khas Sasak dalam meningkatkan perekonomian Desa di Desa Sukarara Kecamatan Joggat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian dan landasan ilmiah untuk memperluas Ilmu Pengetahuan khususnya dalam pengembangan program studi Administrasi Negara yang berkaitan dengan pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Kreatif Menenun Kain Songket Khas Sasak dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sukarara Kecamatan Joggat Lombok Tengah..

#### **2. Manfaat Penelitian Secara Praktis**

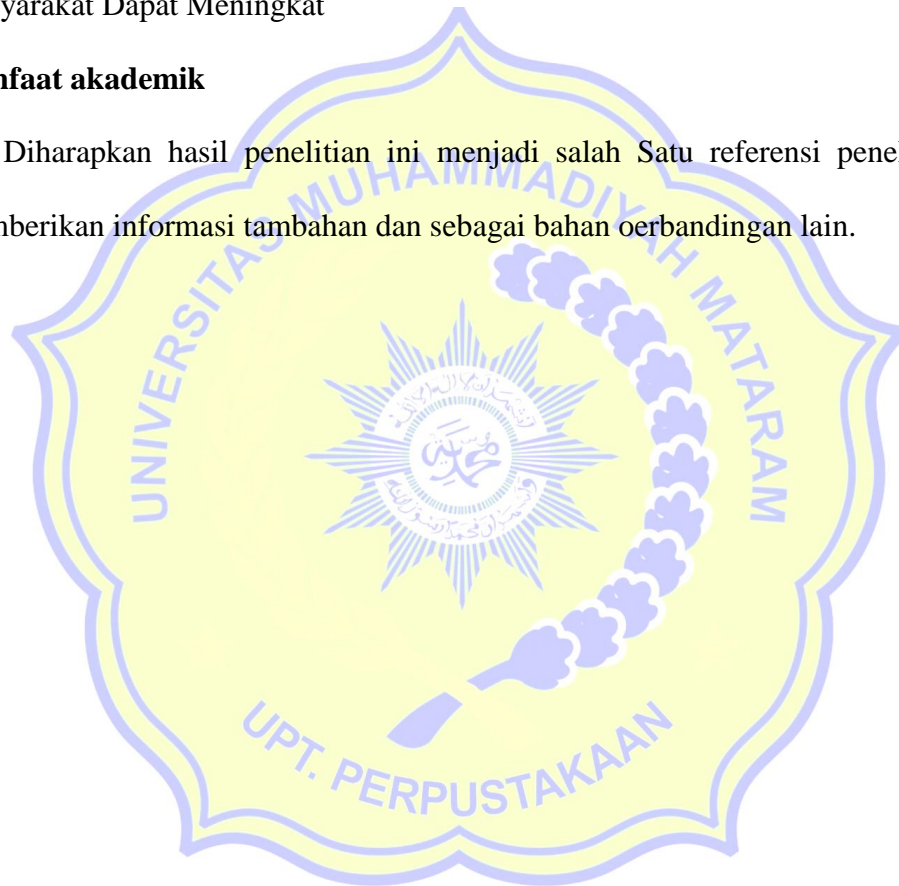
Penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam mengetahui *Pemberdayaan Masyarakat Kreatif Menenun Kain Songket Khas Sasak* dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sukarara dan juga *berkelanjutan* Terhadap *Generasi penerus* karena pada masa ini sudah

*Moderen dan Maju* dan menuntaskan syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (strata 1) di program studi Administrasi Publik.

Manfaat bagi Artshoop dan Juga Masyarakat Desa Sukara Kec. Jonggat Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan pengembangan Kreativitas Masyarakat mEnenun Kain Songket Sehingga Perekonomian Masyarakat Dapat Meningkatkan

### **3. Manfaat akademik**

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah Satu referensi penelitian, memberikan informasi tambahan dan sebagai bahan oerbandingan lain.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji yang dilakukan. Penelitian terdahulu dapat menjadi sebagai sumber referensinyang dapat memperdalam bahan kajian dan pembahasan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut

2.1.1 Tabel  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Peneliti	Hasil Peneliti	Persamaan & perbedaan
1	Aldy Novrianto, 2014	pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Menenun Study Kasus di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan pujung Kabupaten Lombok tengah	Metode Kualitatif	Hasil penelitiannya partisipasi Masyarakat mapu mendorong tercapainya tujuan koperasi industry kerajinan rakyat sentra kapur. Sedangkan upaya dalam peningkatan Ekonomi lokal dengan cara memberkan pinjaman modal dan pelatihan usaha produkti yang bekejasama dengan pihak dina perindustrian dan Perdagangan	Pada Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu, penelitian di lakukan untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan Perekonomian & persamaannya menggunakan Pendekatan Kualitatif metode Deskriptif
2	Moh Amirudin, 2008	Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui Koperasi Industri Kerajinan Masyarakat Sentra Kapur (study Kasus	Metode Kualitatif	Hasil penelitiannya partisipasi Masyarakat mapu mendorong tercapainya tujuan Koperasi Industry Kerajinan Rakyat sentra	persamaannya sama-samamenggunakan Pendekatan Kualitatif

		di Desa Karang Asem, Margasari, Tegal )		kapur. Sedangkan upaya dalam peningkatan Ekonomi lokal dengan cara memberkan pinjaman Modal dan Pelatihan Usaha Produkti yang bekeRjasama dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan	metode Deskriptif
3	Rizal Kusnandi, 2015	peran Pemerintah Desa Dalam pemberdayaan masyarakat	Metode Kualitatif	hasil Penelitiannya diharapkan dapat menjadi salah satu refrensi dan bahan masukan bagi kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemberdayaan Masyarakat di daerahnya	persamaannya sama-samam menggunakan Pendekatan Kualitatif metode Deskriptif
4	Sigit Suwardianto, 2015	Peran Kepala Desa salam pemberdayaan Masyarakat di Desa Sido Agung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman	Metode Kualitatif	Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahwa peran Kepala Desa sudah berperan dengan baik, hanya saja dalam pelaksanaannya kurang terorganisasi dan kurangnya pengawasan dari lembaga adat tersebut	Tidak ada solusi yang di berikan, dan persamaannya menggunakan Pendekatan Kualitatif Metode Deskriptif
5	sony Kristiono, 2017	Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lindung Kemenci Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau	Metode Kualitatif	Hasil Penelitian yang di peroleh gambaran secara keseluruhan bahwa peran Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Lindung Kemenci cukup baik dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	persamaannya mneggunakan pendekatan Kualitatif Metode Deskriptif

Sumber : Aldy Novrianto (2014), Moh Amirudin (2008), Rizal Kusnandi (2015), Sigit Suwardianto, (2015), sony Kristiono, (2017)

Dari penelitian-penelitian diatas terdapat kesamaan pada penelitions belumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan tetapi penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui kreatif Menenun masih layak untuk diteliti, karena sejauh penelusuran belum ditemukan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat kreatif Menenun Kain Songket.

## **2.2.Tinjauan Pustaka**

### **A. Konsep Kepemimpinan**

Konsep kepemimpinan atau *leader* memiliki berbagai pengertian. Pemimpin merupakan dampak interaktif dari faktor individu atau pribadi dengan faktor situasi. Menurut Santoso (2009:25) pemimpin merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan komando atau arahan kepada orang-orang yang telah memberikan kepercayaan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan harapan pemberi kepercayaan tersebut akan lebih baik nasibnya dibandingkan dari kepemimpinan sebelumnya.

Sedangkan menurut Wahjosumidjo (1984:12), kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, bawahan dan situasi.

Menurut Mulyadi (2010:54) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik, antara lain:

- a. Yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukkannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan.



- b. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.
- c. Efektivitas kepemimpinan menurut kemahiran untuk “membaca” situasi.
- d. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan.
- e. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau. Dari berbagai definisi tersebut, maka kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk bisa mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku orang lain atau kelompok yang berada dalam lingkup masyarakat tertentu sehingga bisa diatur sesuai kemauan atau perintah seorang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai situasi/keadaan. Untuk mencapai tujuan tadi mereka yang dipimpin harus patuh karena telah memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk mengarahkan atau sebagai komando.

#### **B. Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Menurut UU No.6 tahun 2014**

Desa sebagai kesatuan wilayah terkecil dalam lingkup wilayah kecamatan di daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa sebagai aparatur pemerintah memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, sebab disamping sebagai abdi negara dalam rangka menyelenggarakan tugas umum pemerintah

dan pembangunan, juga sebagai abdi masyarakat dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah di bawah pengawasan pemerintah pusat, jenis-jenis pelayanan yang dapat diawasi penyelenggaraannya oleh Kepala Desa adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pengurusan pembuatan KTP, pembuatan akta tanah, pelayanan kesehatan, penyuluhan masyarakat, modal usaha dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi Desa pada pasal 2, terdiri dari:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Pelaksana Kewilayahaan

d. Pelaksana Teknis

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 pada Pasal 6-10 yakni:

Pasal 6

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
  - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perDesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### Pasal 7

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 8

- 1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
  - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan dalam paradigma pembangunan masyarakat pada sebuah komunitas bisa dianggap sebagai konsep yang relatif lebih baik dan membawa manfaat yang lebih besar, namun dalam implementasinya masyarakat tidak akan serta merta ikut berpartisipasi penuh dalam program tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sumaryadi (2005:154-158) dijabarkan menjadi 8 faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan yakni:

- 1) Kesiediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
- 2) Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.

- 3) Ketergantungan adalah budaya, di mana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
- 4) Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berpapelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
- 5) Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama di mana pada posisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
- 6) Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya
- 7) Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
- 8) Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (resource) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Berdasarkan faktor faktor tersebut di atas, maka hasil dari sebuah upaya pemberdayaan akan sangat tergantung dari kondisi dan peran masyarakat.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Kepala Desa

Kemudian Usman Sunyoto (2004 : 75) mengemukakan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri atas 2 yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dengan

indikator berikut :

### a) Faktor Pendukung

- Keturunan yang dimaksud disini adalah sosok pemimpin yang berasal dari keluarga baik-baik sehingga ia bisa memperoleh pengakuan masyarakat akan keberadaannya dalam masyarakat.
- Kewibawaan adalah sebagai kekuatan yang terpancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya.
- Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.

### b) Faktor Penghambat

- Kondisi penduduk yang majemuk dan sulitnya menerima perubahan.



- Partisipasi penduduk cenderung tidak tertarik dengan pemberdayaan.
- Fasilitas atau peralatan adalah kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam melaksanakan peranannya..

#### **D. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Istilah Pemberdayaan atau Empowerment menjadi sebuah istilah yang pernah populer ditengah-tengah masyarakat Indonesia terutama pada saat terjadinya krisis moneter yang berimbas kepada krisis yang bersifat multidimensi. Kata “Pemberdayaan” sering dirangkaikan dengan kata lain seperti kata organisasi, birokrasi, dan kata-kata lain, tidak ketinggalan pula kata masyarakat.

Banyak orang memaknai istilah pemberdayaan dari satu sudut pandang sesuai dengan kepentingannya. Namun istilah pemberdayaan sebenarnya memiliki aspek yang sangat luas sehingga menjelaskan istilah pemberdayaan harus digunakan berbagai konsep dan teori dari berbagai pakar yang memang ahli dibidangnya. Oleh karena itu menjelaskan Istilah Pemberdayaan masyarakat dari sudut pandang teoritis diperlukan suatu ketajaman analisa sehingga istilah pemberdayaan masyarakat dapat dikonkritkan menjadi suatu konsep yang diukur dan dapat pula dilihat dari berbagaimacam indikatornya sehingga istilah pemberdayaan masyarakat menjadi suatu istilah yang dapat digambarkan secara jelas.

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003).Pemberdayaan menurut Suhendra (2006 : 74-75) adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dan dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Sedangkan menurut Widjaja (2003 : 169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potesi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

#### **E. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Pada hakikatnya, pemberdayaan masyarakat bukan merupakan hal baru. Upaya pengembangan masyarakat terutama dilandasi oleh ajaran keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, dan kebudayaan tradisonal seperti semangat gotong-royong. Pengembangan masyarakat pada masa lalu erat hubungannya dengan memperjuangkan kemerdekaan, pada saat ini kegiatan pemberdayaan masyarakat berorientasi pada partisipasi pembangunan dalam konteks transformasi sosial.

Korten (1998:25) mengemukakan bahwa strategi program pengembangan masyarakat berorientasi pada pembangunan yang tercermin dalam empat generasi, yaitu; Pertama, generasi yang mengutamakan *relief and welfare*,

yang diperuntukkan sesegera mungkin dapat memenuhi kekurangan atau kebutuhan tertentu yang dialami individu dan/atau keluarga, seperti kebutuhan makanan, kesehatan dan pendidikan. Kedua, generasi yang memusatkan kegiatannya pada *small-scale reliant local development* atau disebut dengan *community development*, pada segmen ini antara lain meliputi pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, dan guna pembangunan infrastruktur, dalam hal ini penyelesaian persoalan masyarakat bawah (*graatoot*) tidak dapat diselesaikan dengan hanya pendekatan *top-down approach*, melainkan membutuhkan pendekatan *bottom up approach*. Ketiga, generasi di mana semua sumber daya manusia dan potensi yang ada harus terlibat dalam *sustainable sistem development*, yakni mulai memperhatikan dampak pembangunan dan cenderung melihat jauh ke daerah lain, baik tingkat regional, nasional, dan internasional. Pada tahap ini terdapat upaya mempengaruhi perumusan kebijakan pemerintah setempat, strategi ini mengharapkan perubahan pada tingkat regional dan nasional. Keempat, generasi yang berperan sebagai fasilitator gerakan masyarakat (*people movement*). Peran pada generasi ini membantu agar rakyat mampu mengorganisasi diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal, dan memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka. Generasi ini tidak sekedar hanya mempengaruhi perumusan kebijakan saja, namun mengharapkan adanya perubahan dalam pelaksanaannya. Prijono (1996:55) mengemukakan lima strategi pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Program pengembangan sumber daya manusia,

- 2) Program pengembangan kelembagaan lokal
- 3) Program pemupukan modal swasta,
- 4) Program pengembangan usaha produktif, dan
- 5) Program penyediaan informasi tepat guna.

Dari penjelasan tadi dapat diartikan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat merupakan suatu langkah atau upaya dalam bentuk kegiatan/program yang bertujuan untuk memberikan kebutuhan atau memenuhi kekurangan masyarakat dan mengarahkan agar sumber daya manusia dan potensi yang ada bisa dikembangkan dan diolah dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri.

#### **F. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat**

##### **1. Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi**

Ekonomi dalam masyarakat merupakan dasar yang menjadi penunjang dalam setiap lini kehidupan. Sehingga sangatlah penting bagi seorang pemimpin untuk berupaya sebaik mungkin untuk mengelola sumber daya yang ada agar bisa menjadi penghasilan/pendapatan untuk perkembangan ekonomi bagi masyarakatnya. Dari berbagai tulisan Sumodiningrat (1999: 27), konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan

masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. pengertian rakyat adalah semua warga negara.

- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- 3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
- 4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- 5) Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price*

*taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.

- 6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dari enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, berwujudkan: (1) pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek; (2) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomimasyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya; (3) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh; (4) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan (5) pemberdayaan

masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

## 2. Pemberdayaan Di Bidang Sosial

Pemberdayaan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (UU Nomor 11 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Pengertian ini mesti dimaknai secara arif, yaitu bahwa tujuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah tujuan awal agar secara bertahap kehidupan yang lebih berkualitas dan kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial secara simultan juga diarahkan agar seluruh potensi kesejahteraan sosial dapat dibangun menjadi sumber kesejahteraan sosial yang mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan sosial, telah ditetapkan struktur organisasi yang menjadi wadah penggerak berjalannya fungsi secara optimal, mempertimbangkan lingkup tugas yang meliputi pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan komunitas adat terpencil (KAT) sertapendayagunaan nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial masyarakat. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bagian Keempat Pasal 12 dan Pasal 13 telah menempatkan pemberdayaan sosial sebagai bagian integral dalam sistem kesejahteraan sosial nasional. Oleh karena itu, sangatlah proporsional jika lingkup ini dikelola secara khusus melalui satuan organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa “Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Sebelum di sebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan

b) Karang Taruna

Karang taruna Indonesia adalah salah satu wadah bagi generasi muda Indonesia yang telah didirikan di Jakarta tepatnya pada tanggal 26 September 1960. Pengertian Karang Taruna adalah sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Karang Taruna sebagai berikut: Definisi Karang Taruna “Karang Taruna Indonesia adalah wadah pengembangan generasi muda dan putusan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab social dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah Desa/kelurahan atau



komunitas social sederajat sampai tingkat nasional, bergerak terutama di bidang kesejahteraan social (Kesos)". (AD KTI, pasal 4).

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi pemuda atau remaja Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. Sehingga karang taruna boleh diaktakan sebagai organisasi modern dan bukan organisai konvensional yang mengangkat pengurus dari kalangan keluarga, keturunan dan kerabat. Dikatakan organisasi modern adalah : "Organisasi di mana faktor-faktor yang bersifat pribadi tidak memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Organisasi modern disebut juga sebagai organisasi rasional dan legal, adalah organisasi yang dalam kegiatannya terdapat pemisahan yang tegas antara urusan pribadi dengan urusan organisasi".

c) Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK merupakan singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Singkatan PKK sepertinya lebih membudaya dari pada kepanjangannya. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Tidak semua masyarakat khususnya ibu-ibu memahami pengertian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Bagi anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tentu menyadari betul eksistensi gerakan ini yang bersifat

nasional. Namun, bagi ibu-ibu yang masih awam, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak bedanya dengan arisan saja. Yakni, suatu kegiatan pertemuan ibu-ibu yang dilaksanakan rutin setiap bulan dengan jamuan sekedarnya. Acarapun dikemas sedemikian rupa sehingga terkesan santai dan kekeluargaan.

### 3. Pemberdayaan Di Bidang Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat terhadap usaha kesehatan agar menjadi sehat sudah sesuai dengan Undang – undang RI, Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya masyarakat. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Berikut uraian jenis-jenis pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yaitu:

- Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan jenis UKBM yang paling memasyarakatkan saat ini. Gerakan posyandu ini telah berkembang dengan pesat secara nasional sejak tahun 1982. Saat ini telah populer di lingkungan Desa dan RW diseluruh Indonesia. Posyandu meliputi lima program prioritas yaitu: KB, KIA, imunisasi, dan penanggulangan diare yang terbukti mempunyai daya ungkit besar terhadap penurunan angka kematian bayi.

### 2.3.Kerangka Berfikir

Seperti yang diketahui bahwa Siagian merupakan salah satu ahli yang mengemukakan pendapat tentang teori peran, dalam hal ini ke tiga indikator tersebut termasuk kedalam faktor yang mempengaruhi. Menurutnya, terdapat 3 indikator yang menentukan keberhasilan suatu peran kebijakan yaitu peran antar personal, peran informasional, peran pengambilan keputusan. Jika salah satu dari ketiga indikator ini kurang maka peran dikatakan tidak berhasil. Selain teori peran yang memiliki indikator, maka disisi lain Tugas Kepala Desa Sukarara juga tentu memiliki indikator tersendiri dalam mengukur keberhasilannya. Seperti yang disebutkan oleh Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. bahwa adapun aspek dari tugas Lembaga Adat Desa Sukarara Kecamatan Jonggat, menjadi fasilitator, Pemberdayaan, hubungan demokratis. Maka jika dikaitkan kedua teori tersebut tentu akan saling berkaitan antara teori peran dengan tugas Lembaga Adat. Dimana proses peran ini nantinya tentu akan mempengaruhi hasil dari tugas Lembaga Adat yang dilakukan, jika peran memenuhi kategori yang sudah ditentukan maka proses tugas Lembaga Adat akan dikatakan berhasil.

**Tabel 2.3**  
**Kerangka Berfikir Penilitia**



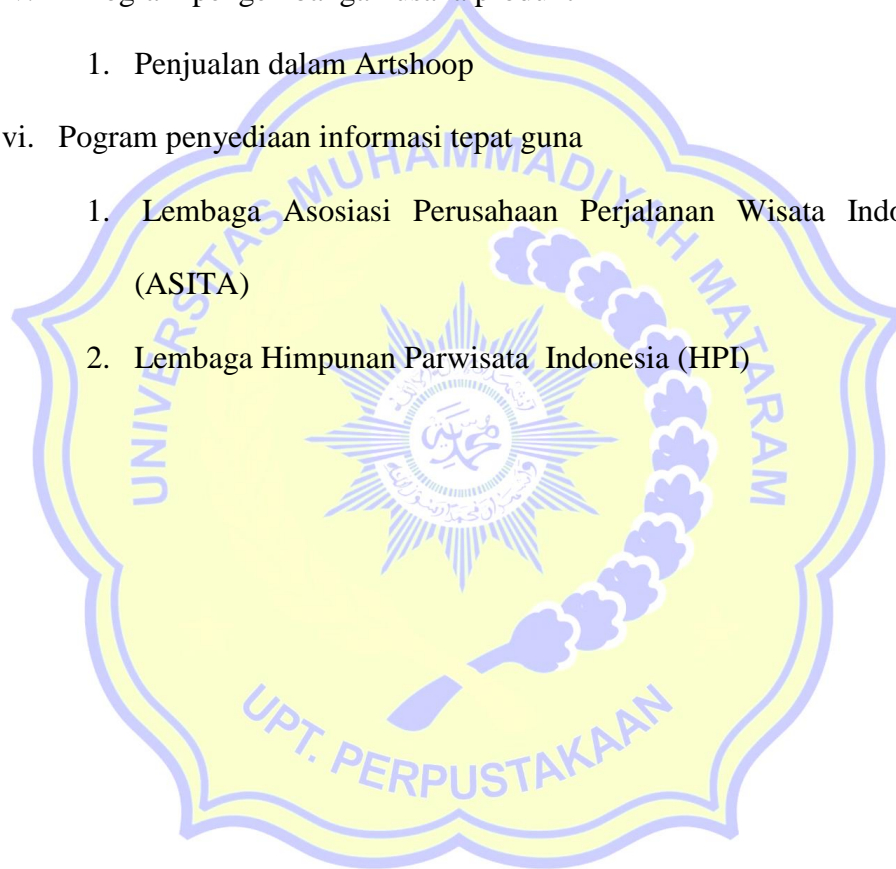
#### 2.3.1. Definisi Konseptual

1. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
2. Strategi pengembangan SDM dalam pemberdayaan masyarakat

#### 2.3.2. Definisi Operasional

- i. Program pengembangan SDM
  - i. Pelatihan
  - ii. Pendidikan
- iii. Program pengembangan kelembagaan lokal

- a. Organisasi
  - Lembaga Adat Desa Sukerare
- b. Partisipasi masyarakat
- iv. Program permodalan swasta
  - 1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- v. Program pengembangan usaha produktif
  - 1. Penjualan dalam Artshoop
- vi. Program penyediaan informasi tepat guna
  - 1. Lembaga Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA)
  - 2. Lembaga Himpunan Parwisata Indonesia (HPI)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan Variable independen (bebas) yaitu Pengaruh Pariwisata dan Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap variable dependen (terkait).

#### **3.2. Waktu dan Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jonggat Lombok Tengah pada 20 November sampai 26 November 2018 dengan pertimbangan bahwa merupakan Desa Sukarara salah satu Desa yang masih kurang optimal dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desanya.

#### **3.3 Narasumber**

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Adapun subjek yang menjadi informan dalam penulisan ini yaitu Lembaga Artshoop (Toko Penjualan hasil penenun). Dalam penentuan informan ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013:300), "*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu." Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

Dalam informasi ini saya mewawancarai

- vii. Lembaga Adat Desa Sukerare (Ketua adat)
- viii. Masyarakat (empat orang)
- ix. Penjual / Artshoop Kain Tenun

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang lebih memahami terhadap fenomena atau gejala sosial karena sifatnya masyarakat yang menjadi subjek. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer: Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang di peroleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak dijadikan informan penelitian. Para pihak yang dijadikan informan penelitian adalah Lembaga Adat, dan juga beberapa Artshoop
2. Data Skunder : Data skunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari berbagai dokumen dan bentuk tulisan, buku, literatur, artikel, maupun dari situs internet dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **3.5.1 Observasi**

Adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang berkaitan dengan objek penelitian secara langsung ditempat penelitian. Dengan mengamati peran lembaga adat tana samawa dalam melestarikan kearifan lokal di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Lombok Tengah, untuk mengetahui berperan atau tidaknya Kepala Desa Sukarara . .

#### **3.5.2 Wawancara**

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat dengan cara bertatap muka langsung dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada informan tersebut.

#### **3.5.3 Dokumentasi**

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendukung keterangan keterangan dan fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian. Dengan cara mencatat serta mengumpulkan data-data yang diambil dari buku-buku, dokumentasi, dan arsip-arsip di kepala Desa, maupun masyarakat. Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara, dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek



yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

### **3.5.4 Teknik Analisis Data**

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### **3.5.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Dalam tahapan reduksi data peneliti memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting dalam penelitian. Kemudian melakukan analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan penelitian terhadap indikator-indikator yang sudah dibuat sebelumnya.

#### **3.5.5 Penyajian Data (*Data Display*)**

Tahap ketiga adalah penyajian data, data yang sudah disusun dan dikelompokkan adalah data-data yang didapat dari lapangan. Dalam penyajian data informasi-informasi yang sudah disusun ditarik sebuah kesimpulan dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan.

#### **3.5.6 Verifikasi (*Conclusion Drawing*)**

Tahapan selanjutnya mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

#### **3.5.7. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa

kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Hal ini dikarenakan menurut penelitian kualitatif suatu realitas itu bersifat majmuk/ganda, dinamis/slalu berubah, sehingga tidak ada konsisten, dan berulang seperti semula. Dengan demikian tidak ada suatu data yang tetap/konsisten/stabil.

